

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN
MENGUNAKAN METODE *VALUE FOR MONEY* PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KARIMUN**

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

**DHEWO DWINARTO
185310241**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dhewo Dwinarto
NPM : 185310241
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value
For Money Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karimun

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA

Mengetahui:

DEKAN

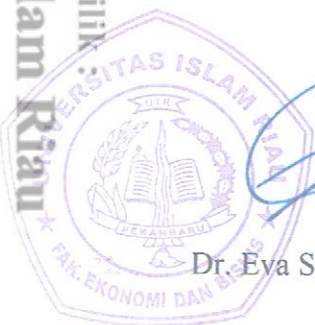
KETUA PRODI

Dr. Eya Sundari, SE., MM., CRBC

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 PEKANBARU – 28284

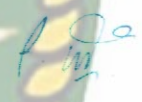

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dhewo Dwinarto
NPM : 185310241
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Penelitian : Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun

Disetujui Oleh:

Tim Penguji:

Tanda Tangan

1. Raja Ade Fitrasari, M. SE., M.Acc ()
2. Rona Naula Oktaviani, SE., M.Ak ()

Pembimbing I

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., CA

Mengetahui:

KETUA JURUSAN




Dr. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 185310241
 Nama Mahasiswa : DHEWO DWINARTO
 Dosen Pembimbing : 1. Dra ENY WAHYUNINGSIH M.Si, Ak., CA 2.
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karimun
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Financial Performance Analysis Using the Value For Money Method at the Regional Financial and Asset Management Agency of Karimun Regency
 Lembar Ke : 1 (Satu)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	14-02-2022	Data-data Pendukung	Perbaiki	
2	20-02-2022	Latar Belakang Masalah dan Bab 1	Perbaiki	
3	25-02-2022	Bab 2 dan Bab 3	Perbaiki	
4	02-03-2022	ACC Seminar Proposal	-	
5	08-04-2022	Pembahasan Masalah	Perbaiki	
6	23-05-2022	Pembahasan Masalah	Perbaiki	
7	28-05-2022	ACC Seminar Hasil	-	

Pekanbaru, 07 Juli 2022
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTG1MZEWMJQX



(Dr. Siska, SE., M.Si., Ak., CA)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 649/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 28 Juni 2022, Maka pada Hari Rabu 29 Juni 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2021/2022

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Dhewo Dwinarto |
| 2. NPM | : 185310241 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun. |
| 5. Tanggal ujian | : 29 Juni 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B+) 79,75 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua


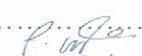

Sekretaris


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA
2. Raja Ade Fitrasari, M, SE., M.Acc
3. Rona N. Oktaviani, SE., M.Ak

()
()
()

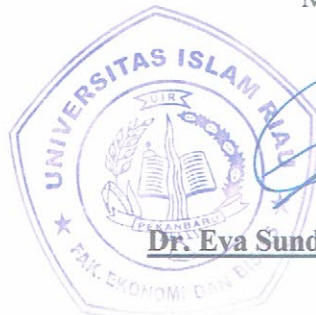
Notulen

1. Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak

()

Pekanbaru, 29 Juni 2022

Mengetahui
Dekan,




Dr. Eya Sundari, SE., MM., CRBC

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 649 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi /oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN-PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

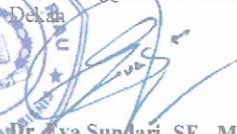
- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

Nama : Dhewo Dwinarto
NPM : 185310241
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun.

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Druji	Jabatan
1	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., CA	Lektor, C/d	Materi	Ketua
2	Raja Ade Fitrasari, M. SE., M.Acc	Asisten Ahli, C/b	Sistematika	Sekretaris
3	Rona Naula Oktaviani, SE., M.Ak	Asisten Ahli C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Lintang Nur Agia, SE., M.Acc., Ak	Asisten Ahli C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Juni 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

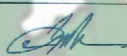
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

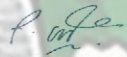
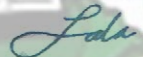
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Dhewo Dwinarto
NPM : 185310241
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun.
Hari/Tanggal : Rabu 29 Juni 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Raja Ade Fitrasari, M, SE., M.Acc		
2	Rona N. Oktaviani, SE., M.Ak		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 78,5)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 29 Juni 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647




BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Dhewo Dwinarto
NPM : 185310241
Judul Proposal : Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karimun.
Pembimbing : 1. Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 16 Maret 2022

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut:

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Efi Susanti, SE., M.Acc	Anggota	2. 
3.	Rona N. Oktaviani, SE., M.Ak	Anggota	3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 16 Maret 2022
Sekretaris,


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1211/Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-22 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 004 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA.	Lektor	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
Nama : Dhewo Dwinarto
N P M : 185310241
Jurusan/Jenjang Pended. : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada SMP Muhammadiyah Karimun
 3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
 4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 22 Oktober 2021



Dekan
Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28264
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : info@uir.ac.id Website : www.eco.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : DHEWO DWINARTO
NPM : 185310241
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN
METODE *VALUE FOR MONEY* PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi sama atau kurang dari 30 % yaitu
30% pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper*
repository, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan
bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Juli 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Siska SE, M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Islam Riau batal saya terima.

Pekanbaru, 06 Juli 2022

Yang memberikan pernyataan



Dhewo Dwinarto
NPM: 185310241

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayahNya kepada saya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul **Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karimun**, guna untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, arahan, dan dukungan orang-orang disekitar penulis. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Siska, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing I yang bersedia menyempatkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajarkan pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis bisa berguna untuk kedepannya dan diberkahi oleh Allah SWT.
6. Kepada Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
7. Kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Teristimewa kepada yang tercinta Kedua Orang Tua penulis yang telah memberikan banyak kasih sayang, perhatian, do'a, pelajaran, dan dukungan yang selalu untuk penulis sehingga dapat melewati semua rintangan.
9. Kepada Kakak yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang, dan motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Abang saudara dan teman-teman yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis untuk selalu berusaha menyelesaikan studi dan tugas akhir ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak terdapat kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dan pengalaman. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan pengetahuan dan tugas akhir ini.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 28 Mei 2022

Dhewo Dwinarto



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Karimun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan menerapkan metode *value for money*. Jenis Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Data yang diambil berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 sampai dengan 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Karimun pada tingkat ekonomis dan efektivitas untuk program/kegiatan dan indikator kinerja tahun 2018 sampai dengan 2020 sudah baik, kecuali pada tingkat efisiensi yang dikategorikan kurang baik.

Kata kunci: *Value for money*, kinerja keuangan



ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Karimun Regency BPKAD in 2018 to 2020 by applying the value for money method. The type of research carried out is qualitative research with the data analysis technique used is descriptive analysis. The research uses documentation as a data collection technique. The data taken is in the form of Government Agencies Performance Accountability Reports from 2018 to 2020. The results of this study indicate that the financial performance of BPKAD Karimun Regency at the economic and effectiveness levels for programs/activities and performance indicators from 2018 to 2020 is good, except for the high efficiency level, categorized as poor.

Keywords: *Value for money, financial performance*



DAFTAR ISI

SKRIPSI	I
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	8
2.1 Telaah Pustaka.....	8
2.1.1 Pengertian Pengukuran Kinerja Keuangan	8
2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan.....	8
2.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan.....	9
2.1.4 Pengertian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	10
2.1.5 Pengertian <i>Value For Money</i>	10
2.1.6 Manfaat <i>Value For Money</i>	14
2.1.7 Pengertian Anggaran.....	14
2.1.8 Fungsi Anggaran Sektor Publik.....	15
2.1.9 Karakteristik Anggaran Sektor Publik	15
2.1.10 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	16
2.2 Penelitian Terdahulu.....	18
2.3 Hipotesis	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Desain Penelitian	20
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian.....	20
3.3 Jenis dan Sumber Data	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data	21
3.5 Teknik Analisis Data	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	25
4.2 Hasil Penelitian.....	27
4.2.1 Perhitungan <i>Value For Money</i> dari segi Ekonomis.....	27
4.2.2 Perhitungan <i>Value For Money</i> dari segi Efisiensi	29
4.2.3 Perhitungan <i>Value For Money</i> dari segi Efektivitas.....	33
4.3 Pembahasan	36
4.3.1 Pembahasan <i>Value For Money</i> dari segi Ekonomis	38
4.3.2 Pembahasan <i>Value For Money</i> dari Segi Efisiensi	40
4.3.3 Pembahasan <i>Value For Money</i> dari Segi Efektivitas.....	42

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	46
5.1 Simpulan.....	46
5.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	48



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah	3
Tabel 1.2	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah	3
Tabel 1.3	Laporan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan BPKAD	4
Tabel 4.1	Hasil Perhitungan Ekonomis Program BPKAD Tahun 2018-2020 ..	29
Tabel 4.2	Hasil Perhitungan Efisiensi Program Pertama Tahun 2018-2020	31
Tabel 4.3	Hasil Perhitungan Efisiensi Program Kedua Tahun 2018-2020	31
Tabel 4.4	Hasil Perhitungan Efisiensi Program Ketiga Tahun 2018-2020	32
Tabel 4.5	Hasil Perhitungan Efektivitas Indikator Kinerja Tahun 2018	34
Tabel 4.6	Hasil Perhitungan Efektivitas Indikator Kinerja Tahun 2019	35
Tabel 4.7	Hasil Perhitungan Efektivitas Indikator Kinerja Tahun 2020	36
Tabel 4.8	Hasil Perhitungan Ekonomis Tahun 2018-2020	38
Tabel 4.9	Hasil Perhitungan Efisiensi Tahun 2018-2020	40
Tabel 4.10	Hasil Perhitungan Efektivitas Tahun 2018-2020	42

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

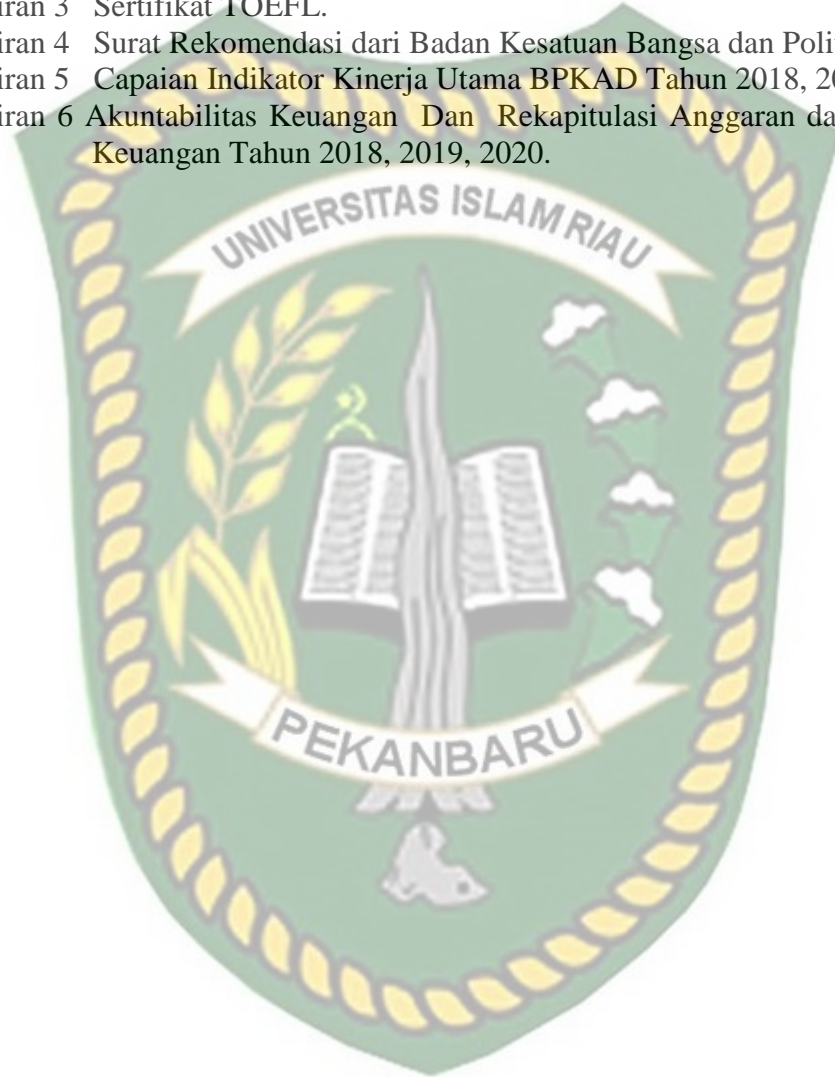
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Karimun26



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Realisasi APBD Tahun 2018-2020.
- Lampiran 2 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Karimun.
- Lampiran 3 Sertifikat TOEFL.
- Lampiran 4 Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Lampiran 5 Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD Tahun 2018, 2019, 2020.
- Lampiran 6 Akuntabilitas Keuangan Dan Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2018, 2019, 2020.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tugas utama pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, masyarakat sering menilai kinerja pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar kurang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangannya.

Pemerintah terkadang sering mengeluarkan biaya-biaya untuk kegiatan yang kurang penting sehingga dianggap sebagai suatu pemborosan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu pilar dalam perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Daerah. Dari perencanaan pembangunan ini pemerintah daerah berusaha melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya perencanaan APBD.

Menurut UU No. 32 Tahun (2004) dijelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintah pusat. Setiap daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Termasuk pada pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota diatur sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam mengelola dana desentralisasi secara transparan,

ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel yang salah satunya bisa diukur dengan *value for money*.

Value for money menurut Mardiasmo (2009) adalah aturan pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga kategori utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalakan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Pengukuran sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Metode *value for money* digunakan juga untuk penilaian bagaimana instansi pemerintah khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tersebut dalam kinerja keuangannya. Apakah anggaran yang didapatkan instansi tersebut sudah di realisasikan untuk kepentingan masyarakat maupun instansi itu sendiri termasuk dalam kategori baik dari segi ekonomis, efisiensi dan juga efektivitas. Jika realisasi anggaran termasuk kategori baik maka bisa jadi tolok ukur juga untuk peningkatan anggaran pada tahun berikutnya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karimun bertugas meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang keuangan dan aset daerah, kinerja Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Karimun dapat diliaht dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun dibawah ini :

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Tahun 2018-2020

Tahun	Pendapatan		%
	Anggaran	Realisasi	
2018	1.144.948.712.058,00	947.147.192.393,65	82,72%
2019	1.044.679.344.257,00	926.323.387.447,31	88,67%
2020	1.024.659.930.184,00	929.713.316.483,00	90,73%

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Tahun 2018-2020

Tahun	Belanja		%
	Anggaran	Realisasi	
2018	98.322.280.675,00	95.627.686.175,00	97,26%
2019	121.324.400.538,00	116.162.265.327,00	95,75%
2020	160.465.564.184,00	153.888.087.268,00	95,90%

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 dapat dilihat bahwa pendapatan dan belanja daerah dari tahun ke tahun mengalami flukstasi yaitu pendapatan pada tahun 2018 terrealisasi sebesar 82,72% dari target yang dianggarkan, dan belanja terrealisasi sebesar 97,26%. Realisasi pendapatan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu terrealisasi sebesar 88,67%, sedangkan belanja mengalami penurunan kecil menjadi sebesar 95,75%. Selanjutnya di tahun 2020 realisasi pendapatan meningkat kembali menjadi sebesar 90,73%, sedangkan belanja mencapai angka 95,90% dari yang dianggarkan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karimun merupakan salah satu organisasi pemerintah, setiap tahunnya memiliki program/kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan kinerjanya. Berikut ini adalah data realisasi program/kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun:

Tabel 1.3
Laporan Realisasi Anggaran Program BPKAD
Tahun 2018-2020

No	Program	Tahun (%)		
		2018	2019	2020
1.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	74,94	-	-
2.	Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah	80,24	99,97	99,57
3.	Pengembangan Data/Informasi	28,84	90,37	-
4.	Perencanaan Pembangunan Daerah	100	99,14	61,65
5.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,56	92,31	87,66
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99,35	99,05	100
7.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35,38	-	-
8.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	94,63	87,36	68,60
9.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	76,53	90,20	93,18

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun

Berdasarkan Tabel 1.3, hanya tahun 2018 program penataan peraturan perundangan perundangan-undangan terealisasi sebesar 74,94%. Pada tahun 2020 program evaluasi dan pelaporan pemerintah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 untuk program pengembangan data/informasi tidak terdapat anggarannya. Untuk program perencanaan pembangunan daerah dan pelayanan administrasi perkantoran tahun 2020 mengalami penurunan daripada tahun 2019. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur telah mencapai

target terealisasi secara maksimal pada tahun 2020. Pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, yang hanya terdapat tahun 2018 sebesar 35,38% yang terealisasi. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan mengalami penurunan dari tahun 2018-2020. Untuk program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah mengalami peningkatan pada tahun 2020 dari tahun 2019 yaitu yang terealisasi sebesar 93,18%.

Dari hasil identifikasi di atas perlu adanya batasan masalah supaya penulis bisa lebih berfokus dalam penelitian ini, yaitu kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun pada program perencanaan pembangunan daerah, pelayanan administrasi perkantoran, dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karimun.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* terhadap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada program perencanaan pembangunan daerah, pelayanan administrasi perkantoran, dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam bagian ini diuraikan manfaat yang diharapkan oleh peneliti setelah penelitian ini dilakukan. Manfaat ini berhubungan dengan hasil penelitian bukan berhubungan dengan peneliti itu sendiri. Manfaat penelitian berisi tiga hal utama yaitu:

1. Bagi Penulis,

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karimun

2. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan mengenai pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karimun dengan menggunakan metode *Value For Money* tersebut.

3. Bagi Peneliti Lain.

Hasil Penelitian ini dapat Sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai hubungan sejenis dengan penelitian ini di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah pemahaman bagi penulis, penelitian ini tersusun pada lima bab yang mencakup:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pada bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang berkaitan pada masalah yang diteliti dan diakhiri dengan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, lokasi penelitian, jenis serta sumber data, teknik dalam mengumpulkan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan yang berisi tentang analisis kinerja keuangan menggunakan metode *value for money* pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten karimun.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisikan simpulan yang ditarik oleh penulis dan berbagai saran untuk masa yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan gambaran tentang taraf pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Menurut Andayani (2007) Pengukuran kinerja ialah alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik.

Kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas. Menurut Khalimatus Syadiah, Susanti & Rasyidi (2016) pengukuran kinerja merupakan evaluasi atau penilaian terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan suatu organisasi berdasarkan tujuan, sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Mahmudi (2010) dapat diklasifikasikan tujuan diterapkan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik adalah:

1. Mengetahui taraf ketercapaian tujuan organisasi.
2. Menyediakan wahana pembelajaran bagi pegawai.
3. Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya.

4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*.
5. Motivasi pegawai.
6. Membangun akuntabilitas.

2.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Bastian (2006) mengatakan bahwa manfaat pengukuran kinerja yaitu:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana untuk ukuran yang digunakan dalam pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati.
3. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja yang sudah disepakati.
5. Menjadi sistem komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam usaha memperbaiki kinerja keuangan.
6. Memeriksa apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Menyampaikan permasalahan yang terjadi.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan guna memenuhi tiga maksud, adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan adalah membantu memperbaiki kinerja pemerintah, maksudnya ialah guna membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Akibatnya, hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya serta pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan guna mewujudkan akuntabilitas publik dan memperbaiki hubungan kelembagaan.

2.1.4 Pengertian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran selama 1 tahun. Instansi pemerintah harus dapat menentukan tingkat kinerja yang dihasilkan dalam bentuk jumlah dan persentase. Manfaat dari LAKIP untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah terkait selama 1 tahun anggaran.

2.1.5 Pengertian *Value For Money*

Menurut Mahmudi (2013) mengatakan bahwa pengukuran kinerja *value for money* merupakan pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisien, serta efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Pengukuran *value for money*

memberikan informasi yang bisa membentuk fungsi-fungsi pengendalian dan mendorong tanggungjawab manajer dalam melaksanakan fungsi akuntabilitas. Konsep *value for money* terdiri dari 3 (tiga) ekategori utama, yaitu: ekonomis, efisien, dan efektivitas.

A. Ekonomis

Menurut Mahmudi (2016) Ekonomis merupakan terkait dengan penghematan anggaran untuk memperoleh input dengan tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional. Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Taraf ekonomis diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran APBD pada program dengan anggaran APBD pada program.

$$Ekonomis = \frac{Input}{Nilai Input} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat ekonomis anggaran belanja sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat ekonomis.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan ekonomis.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup ekonomis.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang ekonomis.

5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat tidak ekonomis.

B. Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2009) Efisiensi merupakan perbandingan antara *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Menurut Hamid & Lamuda (2019) Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Dari pengertian bisa disimpulkan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau aktifitas dengan sumber daya (*input*) yang dignakan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma. Taraf efisiensi diukur dengan cara membandingkan persentase pencapaian setiap kegiatan pada program dengan persentase anggaran APBD yang digunakan oleh setiap kegiatan pada program.

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.

4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

C. Efektivitas

Menurut Mahmudi (2016) Efektivitas merupakan perbandingan dari hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Jika ekonomis berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, sedangkan efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Sedangkan Menurut Mardiasmo (2009) Efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan persentase pencapaian kinerja berdasarkan sasaran dengan persentase target kinerja berdasarkan sasaran.

$$Efektivitas = \frac{Outcome}{Output} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.

4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

D. *Outcome*

Menurut Mardiasmo (2009) *Outcome* merupakan dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Pengukuran *outcome* memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif dan prospektif. Peran retrospektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

2.1.6 Manfaat *Value For Money*

Menurut Haryanto et al. (2007) manfaat value for money sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik agar pemborosan dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*.
4. Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*publik costs awereness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

2.1.7 Pengertian Anggaran

Menurut Nurkholis & Khusaini (2019) Anggaran merupakan sistem bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi nasional, menjamin

kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan kegiatan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya terbatas.

Berdasarkan pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu rencana keuangan yang ditetapkan untuk periode tertentu, biasanya untuk periode satu tahun.

2.1.8 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang.
3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.
6. Anggaran merupakan instrumen politik.
7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

2.1.9 Karakteristik Anggaran Sektor Publik

Karakteristik Anggaran Sektor Publik adalah sebagai berikut:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.10 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

2.1.10.1 Defenisi APBD.

Menurut Tulangow & Runtu (2016) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai tanggal 1 Januari hingga dengan 31 Desember.

2.1.10.2 Fungsi APBD

Menurut Nasution (2019) ada enam fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu:

1. Fungsi Otorisasi

Merupakan anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan..

2. Fungsi Perencanaan

Merupakan anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan

Merupakan anggaran menjadi pedoman dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

Merupakan anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi Distribusi

Merupakan kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

6. Fungsi Stabilisasi

Merupakan anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

2.1.10.3 Unsur-unsur APBD

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin normatif. Maka dalam bentuk yang baru, APBD terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan, meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang meliputi dari sumber ekonomi asli daerah. Dimana PAD ini dibedakan menjadi 4 macam pendapatan yaitu:

- 1) Pajak daerah

- 2) Retribusi
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain pendapatn asli daerah yang sah.

b. Dana perimbangan adalah dana yang didapat dari penerimaan pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah yang membiayai kebutuhan daerah. Adapun dana perimbangan meliputi sebagai berikut:

- 1) Dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak
 - 2) Dana alokasi umum
 - 3) Dana alokasi khusus
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 1) Dana darurat
 - 2) Dana bagi hasil pajak dari provinsi
 - 3) Dana penyesuaian
 - 4) Bantuan keuangan dari Provinsi Pemerintahan Daerah lainnya.
 - 5) Lain-lain pendapatan yang sah.

2. Anggaran Belanja merupakan anggaran yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Putri (2020) dengan judul Analisis *Value For Money* pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menerapkan konsep *value for money* sebagai alat pengukuran kinerja. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan program Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dinyatakan sudah ekonomis, efisien, dan kurang efektif. Persamaan penelitian yaitu sama-sama mengukur kinerja dengan metode *value for money*. Perbedaannya yaitu pada objek yang diteliti, peneliti terdahulu melakukan penelitian pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sedangkan penulis melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang dikemukakan diatas, maka berikut ini penulis kemukakan hipotesis penelitian yaitu Metode *Value For Money* yang diterapkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dalam Tersiana (2018) penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu adalah mengumpulkan data, menganalisis data berdasarkan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam pengambilan kesimpulan dan saran. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun. Penulis menggunakan metode ini karena untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian adalah objek/tempat yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang objektif, *valid* dan *reliabel*. Penentuan objek penelitian harus berdasarkan argumentasi yang logis sesuai dengan permasalahan yang diteliti agar objek tersebut layak untuk menjadi objek/tempat penelitian dilakukan. Objek dari penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun, yang berada di Jl. Sei Raya, Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2018-2020. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersebut diperoleh dari instansi terkait, dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari beberapa referensi penelitian sebelumnya dan berbagai buku pedoman.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai landasan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan metode:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan yang berkompeten dalam Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang akurat.

2. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data yang diambil secara tertulis terutama berupa dokumen, dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun pada tahun 2018-2020 dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

3.5 Teknik Analisis Data

Langkah Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data dengan menggunakan metode *Value For Money* yang dilihat dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

a) Ekonomis

$$Ekonomis = \frac{Input}{Nilai Input} \times 100\%$$

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat ekonomis.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan ekonomis.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup ekonomis.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang ekonomis.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat tidak ekonomis.

b) Efisiensi

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

c) Efektivitas

$$Efektivitas = \frac{Outcome}{Output} \times 100\%$$

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.

5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun berada di Jl. Sei Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah. Sedangkan untuk fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah;
2. Pengelolaan urusan ketatausahaan BPKAD;
3. Penyusunan rencana anggaran dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran Pemerintah Daerah;
4. Pelaksanakan tertib perbendaharaan dan manajemen kas daerah;
5. Pelaksanakan tertib sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
6. Pelaksanakan tertib pengelolaan barang milik daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain di bidang keuangan dan aset daerah yang diberikan oleh Pimpinan/Bupati.

Berikut adalah struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun



Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Aset Daerah, dan Jabatan Fungsional Tertentu (JPT). Bidang Sekretaris terbagi menjadi 3 sub bagian, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, dan Sub Bagian Keuangan dan Aset. Bidang Anggaran terbagi atas 3, yaitu Sub Bidang Anggaran 1, Sub Bidang Anggaran 2, dan Sub

Bidang Anggaran 3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari, Sub Bidang Perbendaharaan 1, Sub Bidang Perbendaharaan 2, dan Sub Bidang Perbendaharaan 3. Bidang Akuntansi terbagi menjadi, Sub Bidang Akuntansi 1, Sub Bidang Akuntansi 2, dan Sub Bidang Akuntansi 3. Bidang Aset Daerah terdapat 3 Sub Bidang, yaitu Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengendalian Aset Daerah, Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah, dan Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset.

4.2 Hasil Penelitian

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki program-program setiap tahunnya. Dalam setiap program terdapat kegiatan yang harus dilakukan setiap tahunnya. Di dalam LAKIP BPKAD Kabupaten Karimun terdapat beberapa program yang mana pada tahun 2018 terdapat 9 program, tahun 2019 terdapat 7 program, dan tahun 2020 terdapat 6 program. Dalam penelitian ini penulis berfokus hanya pada 3 program, yaitu program perencanaan pembangunan daerah, pelayanan administrasi perkantoran, dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk perhitungan ekonomis dan efisiensi, sedangkan untuk perhitungan efektivitas menggunakan capaian indikator kinerja utama pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

4.2.1 Perhitungan *Value For Money* dari segi Ekonomis

Perhitungan Ekonomis memerlukan data-data mengenai anggaran dan realisasinya. Guna mencocokkan besar tingkat ekonomis suatu program dalam menyalurkan anggaran yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah atau organisasi tersebut.

$$Ekonomis = \frac{Input}{Nilai Input} \times 100\%$$

Ketentuan:

1. Jika hasil >100%, maka dikatakan sangat ekonomis.
2. Jika hasil 90% - 100%, maka dikatakan ekonomis.
3. Jika hasil 80% - 90%, maka dikatakan cukup ekonomis.
4. Jika hasil 60% - 80%, maka dikatakan kurang ekonomis.
5. Jika hasil <60%, maka dikatakan sangat tidak ekonomis.

Keterangan:

Input : Realisasi Anggaran APBD pada program yang terdapat dalam Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Nilai Input : Anggaran APBD pada program dalam Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Contoh perhitungan ekonomis pada program perencanaan pembangunan daerah tahun 2018:

$$Ekonomis = \frac{13.194.000}{13.194.000} \times 100\% = 100\%$$

Hasil perhitungan pada program perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 adalah 100%, kinerja untuk program diatas termasuk sangat ekonomis. Analisis perhitungan dari segi ekonomis pada program perencanaan pembangunan daerah, pelayanan administrasi perkantoran, dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur tahun 2018 sampai 2020 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Perhitungan Ekonomis Program Perencanaan Pembangunan Daerah,
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Tahun 2018-2020

No	Program	Tahun	Anggaran	Realisasi	Ekonomis
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah	2018	13.194.000	13.194.000	100%
		2019	23.292.500	23.092.000	99,14%
		2020	64.911.750	40.017.629	61,65%
2.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2018	6.999.690.000	6.758.707.659	95,56%
		2019	8.277.409.500	7.640.936.066	92,31%
		2020	7.115.579.933	6.237.632.408	87,66%
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2018	1.205.176.500	1.197.357.205	99,35%
		2019	124.584.000	123.397.400	99,05%
		2020	196.600.250	196.600.250	100%

Sumber: Data Olahan Lampiran Nomor 6

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, bahwa kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Karimun pada program perencanaan pembangunan daerah, program pelayanan administrasi perkantoran, dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tahun 2018-2020 terdapat ada yang memiliki nilai ekonomis sebesar 100% dan di bawah 100% dalam setahun. Yang mana jika nilai ekonomis diatas 100% termasuk kategori sangat ekonomis dan jika nilai dibawah 100% bisa termasuk dalam kategori ekonomis, cukup ekonomis, kurang ekonomis, dan sangat tidak ekonomis tergantung nilai ekonomisnya.

4.2.2 Perhitungan *Value For Money* dari segi Efisiensi

Perhitungan efisiensi diukur melalui perbandingan antara *output* dengan *input*. Jika *output* lebih besar dibandingkan dengan *input*, maka tingkat efisiensi akan semakin tinggi dalam suatu kegiatan/program dalam instansi pemerintah atau organisasi tersebut.

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

Ketentuan:

1. Jika hasil lebih dari 100%, maka dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil antara 90% - 100%, maka dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil antara 80% - 90%, maka dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil antara 60% - 80%, maka dikatakan efisien.
5. Jika hasil dibawah 60%, maka dikatakan sangat efisien.

Keterangan:

Output : Persentase pencapaian setiap kegiatan pada program yang terdapat dalam Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Input : Persentase Anggaran APBD yang digunakan oleh setiap kegiatan pada program dalam BPKAD.

Contoh perhitungan efisiensi pada kegiatan penyusunan rencana kerja program perencanaan pembangunan daerah tahun 2018:

$$Efisiensi = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Hasil perhitungan efisiensi pada kegiatan penyusunan rencana kerja program perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 adalah 100%, kinerja untuk kegiatan diatas termasuk kurang efisiensi. Analisis perhitungan dari segi efisiensi pada setiap kegiatan yang ada dalam program perencanaan pembangunan daerah, pelayanan administrasi perkantoran, dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur tahun 2018 sampai 2020 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Perhitungan Efisiensi Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2018-2020

No	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tahun	Output (%)	Input (%)	Efisiensi (%)
1.	Penyusunan Rencana Kerja	2018	100	100	100
1.	Penyusunan Rencana Kerja		100	100	100
2.	Penyusunan Perjanjian Kinerja Semua Eselon dan Pengukuran Indikator Kinerja OPD	2019	100	97,65	102,41
3.	Evaluasi Renstr		100	100	100
1.	Penyusunan Rencana Kerja		100	95,37	104,85
2.	Penyusunan Perjanjian Kinerja Semua Eselon dan Pengukuran Indikator Kinerja OPD	2020	100	40,65	246

Sumber: Data Olahan Lampiran Nomor 6

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, bahwa kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Karimun pada kegiatan yang terdapat dalam program perencanaan pembangunan daerah dari tahun 2018-2020 ada 3 kegiatan yang nilai efisiensi diatas 100% dan terdapat 3 kegiatan dengan nilai efisiensi sebesar 100%. Yang mana jika nilai efisiensinya diatas 100% termasuk kategori tidak efisien dan jika dibawah 100% bisa termasuk kategori kurang efisien, cukup efisien, efisien, dan sangat efisien tergantung nilai efisiensinya.

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Efisiensi Program Pelayanan Administrasi Kantor
Tahun 2018-2020

No	Program Pelayanan Administrasi Kantor	Tahun	Output (%)	Input (%)	Efisiensi (%)
1.	Pelayanan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	2018	140,96	92,39	152,57
2.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran		140,96	96,66	145,83

1.	Pelayanan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	2019	100	97,08	103,01
2.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran		100	92,14	108,53
1.	Pelayanan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	2020	100	85,98	116,31
2.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran		100	87,71	114,01

Sumber: Data Olahan Lampiran Nomor 6

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, bahwa kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Karimun pada kegiatan yang terdapat dalam program perencanaan pembangunan daerah dari tahun 2018-2020 semua kegiatan memiliki nilai efisiensi diatas 100%. Yang mana jika nilai efisiensinya diatas 100% termasuk kategori tidak efisien dan jika dibawah 100% bisa termasuk kategori kurang efisien, cukup efisien, efisien, dan sangat efisien tergantung nilai efisiensinya.

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Efisiensi Program Sarana dan Prasarana Aparatur
Tahun 2018-2020

No	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	Tahun	Output (%)	Input (%)	Efisiensi (%)
1.	Rehabilitasi Toilet Kantor	2018	140,96	99,18	142,13
2.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran		140,96	99,29	141,97
3.	Pengadaan Meubelier		100	100	100
4.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100	98,87	101,14
5.	Pengadaan Partisi		100	100	100
1.	Pengadaan Meubelier	2019	100	99,7	100,3
2.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100	100	100
3.	Pengadaan Partisi		100	98,84	101,17
1.	Pengadaan Partisi	2020	100	100	100

Sumber: Data Olahan Lampiran Nomor 6

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, bahwa kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Karimun pada kegiatan yang terdapat dalam program perencanaan pembangunan daerah dari tahun 2018-2020 ada 5 kegiatan yang nilai efisiensi diatas 100% dan terdapat 4 kegiatan dengan nilai efisiensi sebesar 100%. Yang mana jika nilai efisiensinya diatas 100% termasuk kategori tidak efisien dan jika dibawah 100% bisa termasuk kategori kurang efisien, cukup efisien, efisien, dan sangat efisien tergantung nilai efisiensinya.

4.2.3 Perhitungan *Value For Money* dari segi Efektivitas

Perhitungan efektivitas diukur melalui perbandingan antara *outcome* dengan *output*. Semakin tinggi hasil dari efektivitas, maka sebuah program/kegiatan dikatakan lebih efektif. Pada LAKIP BPKAD Kabupaten Karimun, tingkat capaian kinerja tidak dirincikan pada tiap program/kegiatan, tetapi disajikan menurut pencapaian sasaran dengan beberapa indikator kinerja. Berdasarkan data dari BPKAD Kabupaten Karimun, untuk menganalisis perhitungan efektivitas di analisis dari data indikator kinerja yang terdapat pada LAKIP BPKAD Kabupaten Karimun periode tahun 2018-2020.

$$Efektivitas = \frac{Outcome}{Output} \times 100\%$$

Ketentuan:

1. Jika hasil lebih dari 100%, maka dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil antara 90% - 100%, maka dikatakan efektif.
3. Jika hasil antara 80% - 90%, maka dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil antara 60% - 80%, maka dikatakan kurang efektif.

5. Jika hasil dibawah 60%, maka dikatakan tidak efektif.

Keterangan:

Outcome : Persentase pencapaian kinerja berdasarkan sasaran yang terdapat dalam Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Output : Persentase Target Kinerja berdasarkan sasaran dalam Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Contoh perhitungan efisiensi pada indikator kinerja persentase penyerapan belanja daerah tahun 2018:

$$\text{Efektivitas} = \frac{96,78\%}{90\%} \times 100\% = 107,53\%$$

Hasil perhitungan efektivitas pada indikator kinerja persentase penyerapan belanja daerah tahun 2018 sebesar 107,53%, untuk indikator ini termasuk sangat efektif. Analisis perhitungan dari segi efektivitas pada setiap indikator kinerja yang ada dalam BPKAD Kabupaten Karimun tahun 2018 sampai 2020 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Efektivitas pada Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten Karimun Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian Kinerja (%)	Efektivitas
1.	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah	Persentase Penyerapan Belanja Daerah	90	96,78	107,53%
		Persentase Keakuratan Data Barang Milik Daerah	70	140,96	201,37%

2.	Meningkatnya Pelayanan dan Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Administrasi Penatausahaan Keuangan yang Diselesaikan tepat Waktu Sesuai SOP	100	100	100%
----	---	---	-----	-----	------

Sumber: Data Olahan Lampiran Nomor 5

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, terdapat 2 indikator kinerja yang nilai efektivitasnya diatas 100%, 1 indikator kinerja dengan nilai efektivitas sebesar 100%. Yang mana jika nilai efektivitasnya diatas 100% maka termasuk kategori sangat efektif dan jika dibawah 100% termasuk kategori efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak efektif tergantung nilai efektivitasnya.

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Efektivitas pada Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten Karimun Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian Kinerja (%)	Efektivitas
1.	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah	Persentase Penyerapan Belanja Daerah	90	98,77	109,74%
		Persentase Keakuratan Data Barang Milik Daerah	70	140,39	200,56%
2.	Meningkatnya Pelayanan dan Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Administrasi Penatausahaan Keuangan yang Diselesaikan tepat Waktu Sesuai SOP	100	100	100%

Sumber: Data Olahan Lampiran Nomor 5

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, terdapat 2 indikator kinerja yang nilai efektivitasnya diatas 100%, 1 indikator kinerja dengan nilai efektivitas sebesar 100%. Yang

mana jika nilai efektivitasnya diatas 100% maka termasuk kategori sangat efektif dan jika dibawah 100% termasuk kategori efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak efektif tergantung nilai efektivitasnya.

Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Efektivitas pada Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten Karimun Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian Kinerja (%)	Efektivitas
1.	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah	Persentase Penyerapan Belanja Daerah	90	98,5	109,44%
		Persentase Keakuratan Data Barang Milik Daerah	70	140,44	200,63%
2.	Meningkatnya Pelayanan dan Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Administrasi Penatausahaan Keuangan yang Diselesaikan tepat Waktu Sesuai SOP	100	100	100%

Sumber: Data Olahan Lampiran Nomor 5

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, terdapat 2 indikator kinerja yang nilai efektivitasnya diatas 100%, 1 indikator kinerja dengan nilai efektivitas sebesar 100%. Yang mana jika nilai efektivitasnya diatas 100% maka termasuk kategori sangat efektif dan jika dibawah 100% termasuk kategori efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak efektif tergantung nilai efektivitasnya.

4.3 Pembahasan

Dalam menggunakan metode *Value For Money* terdapat beberapa kriteria-kriteria dalam menentukan apakah program/kegiatan yang dilaksanakan oleh

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun telah berjalan secara ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat ekonomis anggaran belanja sebagai berikut: (1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat ekonomis, (2) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan ekonomis, (3) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup ekonomis, (4) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang ekonomis, dan (5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat tidak ekonomis. Sedangkan untuk kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut: (1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien, (2) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien, (3) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien, (4) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien, dan (5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien. Untuk kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut: (1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif, (2) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif, (3) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif, (4) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja

dikatakan kurang efektif, dan (5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

4.3.1 Pembahasan *Value For Money* dari segi Ekonomis

Tabel 4.8
Perhitungan Ekonomis
Tahun 2018-2020

No	Program	Tahun (%)		
		2018	2019	2020
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	99,14	61,65
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95,56	92,31	87,66
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99,35	99,05	100

Sumber: Data Olahan

Pada tahun 2018, dapat dikatakan untuk program perencanaan pembangunan daerah memiliki nilai ekonomis sebesar 100%, yang artinya dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah BPKAD telah ekonomis. Sama dengan program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur juga telah ekonomis tetapi memiliki nilai ekonomis yang berbeda, yaitu pada program pelayanan administrasi perkantoran sebesar 95,56% dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 99,35%. Dari hasil diatas menunjukkan bahwa kinerja BPKAD Tahun 2018 telah baik dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2019, dapat dilihat untuk program perencanaan pembangunan daerah memiliki nilai ekonomis sebesar 99,14%, program pelayanan administrasi perkantoran sebesar 92,31%, dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 99,05%, yang artinya dalam pengelolaan anggaran pendapatan

dan belanja daerah BPKAD telah ekonomis. Dari hasil diatas menunjukkan bahwa kinerja BPKAD Tahun 2019 telah baik walaupun belum 100% dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020, dapat dikatakan untuk program perencanaan pembangunan daerah memiliki nilai ekonomis sebesar 61,65%, yang artinya dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah BPKAD kurang ekonomis. Berbeda dengan program pelayanan administrasi perkantoran yang memiliki nilai ekonomis sebesar 87,66%, yang artinya cukup ekonomis. Sedangkan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur termasuk kategori yang telah ekonomis dengan memiliki nilai ekonomis sebesar 100%. Dari hasil diatas menunjukkan bahwa kinerja BPKAD Tahun 2020 setiap program memiliki nilai ekonomis dan kategori yang berbeda beda dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan.

Dari tahun 2018-2020 program yang tidak tercapai adalah program perencanaan pembangunan daerah tahun 2020. Anggaran yang ditetapkan oleh BPKAD untuk program perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2020 sebesar Rp64.911.750 dan yang terealisasi sebesar Rp40.017.629 atau setara dengan 61,65%. Penyebab tidak tercapainya program perencanaan pembangunan daerah tahun 2020 dikarenakan adanya kendala dalam hal pembangunan, hal ini terjadi karena adanya larangan beraktivitas di luar rumah yang disebabkan oleh pandemi virus covid-19.

4.3.2 Pembahasan *Value For Money* dari Segi Efisiensi

Tabel 4.9
Perhitungan Efisiensi
Tahun 2018-2020

No	Program	Tahun (%)		
		2018	2019	2020
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100,8	175,43
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	149,2	105,77	115,16
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	117,05	100,49	100

Sumber: Data Olahan

Pada tahun 2018, dapat dilihat untuk program perencanaan pembangunan daerah memiliki nilai efisiensi sebesar 100%, yang artinya dalam pencapaian kinerja dan anggaran pada BPKAD masih kurang efisien. Berbeda dengan program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang masuk kedalam kategori tidak efisien karena memiliki nilai efisiensi yang berbeda, yaitu pada program pelayanan administrasi perkantoran sebesar 149,2% dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 117,05%. Dari hasil diatas menunjukkan bahwa kinerja BPKAD Tahun 2018 masih belum efisien dalam pencapaian kinerja dan anggaran tersebut.

Pada tahun 2019, dapat dikatakan untuk program perencanaan pembangunan daerah memiliki nilai efisiensi sebesar 100,8%, yang artinya dalam pencapaian kinerja dan anggaran pada BPKAD masih tidak efisien. Sama halnya dengan program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang juga masih tidak efisien tetapi memiliki nilai efisiensi

yang berdeda, yaitu pada program pelayanan administrasi perkantoran sebesar 105,77% dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100,49%. Dari hasil diatas menunjukkan bahwa kinerja BPKAD Tahun 2019 masih belum efisien dalam pencapaian kinerja dan anggaran tersebut karena nilai ekonomisnya melebihi angka 100%

Pada tahun 2020, dapat dilihat untuk program perencanaan pembangunan daerah memiliki nilai efisiensi sebesar 175,43%, nilai ini melambung tinggi dari tahun-tahun sebelumnya tetapi dalam pencapaian kinerja dan anggaran pada BPKAD masih sama, yaitu tidak efisien. Sama halnya dengan program pelayanan administrasi perkantoran yang masuk ke kriteria tidak efisien dengan nilai efisiensi sebesar 115,16%. Sedangkan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur juga masih kurang efisien dengan memiliki nilai efisiensi sebesar 100%. Dari hasil diatas menunjukkan bahwa kinerja BPKAD Tahun 2020 masih belum efisien dalam pencapaian kinerja dan anggaran tersebut karena nilai ekonomisnya melebihi angka kriteria dari efisien.

Program yang tidak efisien pada tahun 2018 adalah proram pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Sedangkan pada tahun 2019 ketiga program yang ada tidak efisien. Tahun 2020, program yang tidak efisien adalah program perencanaan pembangunan daerah dan program pelayanan administrasi perkantoran. Tidak efisiennya program pada tahun 2018 dan 2019 disebabkan anggaran belanja untuk program yang sudah disiapkan tidak tercapai secara maksimal. Sedangkan pada tahun 2020, program dikategorikan tidak efisien disebabkan karena pembatasan interaksi di luar rumah

yang menyebabkan terhentinya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program yang telah disusun.

4.3.3 Pembahasan *Value For Money* dari Segi Efektivitas

Tabel 4.10
Perhitungan Efektivitas
Tahun 2018-2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (%)		
			2018	2019	2020
1.	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah	Persentase Penyerapan Belanja Daerah	107,53	109,74	109,44
		Persentase Keakuratan Data Barang Milik Daerah	201,37	200,56	200,63
2.	Meningkatnya Pelayanan dan Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Administrasi Penatausahaan Keuangan yang Diselesaikan tepat Waktu Sesuai SOP	100	100	100

Sumber: Data Olahan

Pada Tahun 2018, mengenai perhitungan efektivitas dapat dilihat terdapat 3 indikator kinerja yang mana 2 indikator memiliki nilai efektivitas lebih dari 100%. Berdasarkan kriteria efektivitas, 2 kegiatan tersebut sudah sangat efektif. Kedua indikator kinerja tersebut adalah persentase penyerapan belanja daerah dengan nilai efektivitas sebesar 107,53% dan persentase keakuratan data barang milik daerah sebesar 201,37%. Sedangkan 1 indikator kinerja lainnya memiliki nilai efektivitas sebesar 100%. Hal ini menyatakan bahwa indikator kinerja tersebut efektif, yang mana indikator kinerja tersebut adalah persentase administrasi penatausahaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP. Dari hasil

diatas menyatakan bahwa capaian hasil kinerja pada 2 indikator kinerja melebihi target dan 1 indikator lainnya telah mencapai target yang diinginkan oleh BPKAD Kabupaten Karimun tersebut.

Pada Tahun 2019, mengenai perhitungan efektivitas dapat dilihat terdapat 3 indikator kinerja yang mana 2 indikator memiliki nilai efektivitas lebih dari 100%. Berdasarkan kategori efektivitas, 2 kegiatan tersebut sudah sangat efektif. Kedua indikator kinerja tersebut adalah persentase penyerapan belanja daerah dengan nilai efektivitas sebesar 109,74% yang mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 2,21% dan persentase keakuratan data barang milik daerah sebesar 200,56% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,81%. Sedangkan 1 indikator kinerja lainnya memiliki nilai efektivitas sebesar 100% sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini menyatakan bahwa indikator kinerja tersebut efektif, yang mana indikator kinerja tersebut adalah persentase administrasi penatausahaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP. Dari hasil diatas menyatakan bahwa capaian hasil kinerja pada 2 indikator kinerja melebihi target dan 1 indikator kinerja telah mencapai target yang diinginkan dan oleh BPKAD Kabupaten Karimun tersebut.

Pada Tahun 2020, mengenai perhitungan efektivitas dapat dikatakan terdapat 3 indikator kinerja yang mana 2 indikator memiliki nilai efektivitas lebih dari 100%. Berdasarkan kategori efektivitas, 2 kegiatan tersebut sudah sangat efektif. Kedua indikator kinerja tersebut adalah persentase penyerapan belanja daerah dengan nilai efektivitas sebesar 109,44% yang mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 0,30% dan persentase keakuratan data barang milik daerah sebesar

200,63% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,07%. Sedangkan 1 indikator kinerja lainnya memiliki nilai efektivitas sebesar 100% sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyatakan bahwa indikator kinerja tersebut efektif, yang mana indikator kinerja tersebut adalah persentase administrasi penatausahaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP. Dari hasil diatas menyatakan bahwa capaian hasil kinerja pada 2 indikator kinerja melebihi target dan 1 indikator kinerja telah mencapai target yang diinginkan dan oleh BPKAD Kabupaten Karimun tersebut.

Indikator kinerja pada tahun 2018-2020 terdiri dari persentase penyerapan belanja daerah, persentase keakuratan data barang milik daerah, dan persentase administrasi penatausahaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP telah sangat efektif. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang dilakukan oleh BPKAD telah melebihi target yang diharapkan.

Dalam perhitungan efektivitas ini menggunakan data mengenai sasaran/indikator kinerja karena BPKAD Kabupaten Karimun menampilkan capaian kinerja dan target kinerja hanya setiap indikator kinerja saja tanpa menampilkan hasil capaian dan target kinerja setiap kegiatan maupun setiap program. Hal ini tidak mempengaruhi hubungan dengan antara perhitungan ekonomis dan efisiensi dengan efektivitas, yang mana untuk perhitungan ekonomis dan efisiensi itu dihitung perprogram dan efektivitas dihitung perindikator kinerja. Karena sebelum ada hasil pencapaian dan target kinerja berdasarkan indikator kinerja pastinya pihak bersangkutan menghitungnya

terlebih dahulu setiap kegiatan maupun setiap program yang setelah itu baru dihitung perindikator kinerja atau sasarnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dari tahun 2018-2020 untuk tiap program dan indikator kinerja telah ekonomis dan efektif, tetapi masih banyak program yang memiliki tingkat efisien diatas 100%. Dari 3 program hanya program perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tahun 2020 yang memiliki nilai efisiensi sebesar 100%. Nilai tersebut juga berdampak pada BPKAD Kabupaten Karimun, karena melebihi kriteria efisiensi yang telah ditentukan. Ini berarti kinerja BPKAD Kabupaten Karimun hanya melakukan program rutin tanpa berusaha memaksimalkan realisasi anggaran pada tiap program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk BPKAD Kabupaten Karimun tersebut.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pada tahun 2018 dan 2019, program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bersifat ekonomis. Sedangkan pada tahun 2020 untuk program perencanaan pembangunan daerah bersifat kurang ekonomis, program pelayanan administrasi perkantoran bersifat cukup ekonomis, dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur bersifat ekonomis.
2. Pada tahun 2018-2020, hampir semua program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun bersifat tidak efisien. Terdapat 2 kegiatan ditahun berbeda yang bersifat kurang efisien, yaitu program perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tahun 2020.
3. Pada tahun 2018-2020, untuk indikator kinerja presentase penyerapan belanja daerah dan persentase keakuratan data barang milik daerah saja yang bersifat sangat efektif. Sedangkan untuk indikator kinerja persentase administrasi penatausahaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP bersifat efektif.

5.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun.

Badan pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun diharapkan bisa melakukan evaluasi kembali program/kegiatan yang dilaksanakan agar bisa mencapai target dan memperoleh pencapaian kinerja dari program/kegiatan pada target yang telah ditetapkan serta bisa memenuhi kategori dalam *value for money*.

2. Bagi penelitian selanjutnya.

Peneliti selanjutnya diharapkan bisa meneliti kinerja keuangan dengan data-data yang lebih banyak dan lengkap agar hasil penelitian lebih sempurna.



DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, W. (2007). *Akuntansi Sektor Publik (Ke-1)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Hamid, A., & Lamuda, I. (2019). Evaluation of Financial Performance Through Approach To Value for Money Pendekatan Value for Money. *Gorontalo Accounting Journal*, 2(1), 31–41. Diambil dari <https://jurnal.widyagama.ac.id/index.php/cebi/article/view/89/40>
- Haryanto, Sahmuudin, & Arifuddin. (2007). *Akuntansi Sektor Publik (ke-1)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Khalimatus Syadiah, Susanti, W., & Rasyidi, A. (2016). Analisis Value for Money Dalam Pengukuran Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Riset*, 9–20.
- Mahmudi. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Terbaru)*. Yogyakarta: ANDI.
- Nasution, D. A. D. (2019). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah)*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nurkholis, & Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Putri, N. Z. A. (2020). Analisis Value For Money pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. *Skripsi Analisis Value For Money pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Yogyakarta.
- TR, N., & RN, K. (2004). Undang-undang No. 32 Tahun 2004, 101(3), 55. Diambil dari <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>

Tulangow, A. P., & Runtu, T. (2016). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3), 564–571.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau